

Resonansi Black Lives Matter di Australia

Frisca Alexandra¹, Rahma Daniah²

¹Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Surel: frisca.alexandra2108@gmail.com)

²Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Surel: daniarahm@gmail.com)

Diajukan:; Direvisi:; Disetujui untuk terbit:

Hal 00 – 00

Untuk mengutip artikel ini: Alexandra, F. (2020). Resonansi Black Lives Matter di Australia. *Interdependence Journal of International Studies*. 1(2), 01-12 (d disesuaikan)

ABSTRACT

In 2020, the Black Lives Matter movement has gained the attention of international society. The movement that started in the United States is now resonating in Australia. Australia itself has a long history of racial discrimination against Aborigines. Even though the Australian government has formally apologized for its racial discrimination policies in the past and made a number of efforts to improve the lives of Aborigines, in fact, the lives of Aborigines are still far from prosperous. Even the death rate of Aborigines in prison is the highest in the world. Using the New Social Movement Theory, the author analyzes that social conditions in Australian society have created a dominant conflict, this is what causes the Black Lives Matter movement resonate in Australia. Through Amartya Sen's thoughts, the author provides a solution that is expected to be able to stop various acts of racial discrimination

Keywords: *Racial Discrimination, Black Lives Matter, Aborigines*

ABSTRAK

Di tahun 2020, gerakan *Black Lives Matter* kembali menyita perhatian masyarakat internasional. Gerakan yang bermula di Amerika Serikat itu kini beresonansi hingga ke Australia. Australia sendiri memiliki sejarah panjang terkait kasus diskriminasi rasial terhadap masyarakat suku Aborigin. Meskipun pemerintah Australia telah secara resmi menyatakan permintaan maaf terkait kebijakan diskriminasi rasial dimasa lampau serta melakukan sejumlah upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat suku Aborigin namun nyatanya, kehidupan masyarakat suku Aborigin masih jauh dari kata sejahtera. Bahkan angka kematian masyarakat suku Aborigin di dalam penjara menjadi yang tertinggi diseluruh dunia. Dengan menggunakan *New Social Movement Theory*, penulis menganalisa bahwa kondisi sosial di dalam masyarakat Australia telah menciptakan konflik dominan, hal inilah yang menyebabkan gerakan *Black Lives Matter* beresonansi di Australia. Melalui pemikiran Amartya Sen, penulis memberikan solusi yang diharapkan mampu menghentikan berbagai tindakan diskriminasi rasial..

Kata Kunci: *Diskriminasi Rasial, Black Lives Matter, Suku Aborigin*

PENDAHULUAN

Isu diskriminasi rasial menjadi salah satu isu yang kerap menjadi perhatian publik internasional. Isu diskriminasi rasial sendiri sesungguhnya bukanlah suatu isu yang baru. Simon Fisher melalui teori identitas-nya mengatakan bahwa bagi setiap manusia, identitas memiliki arti yang sangat penting karena identitas dapat menjadi instrumen yang akan mempertegas jati diri seorang manusia. Lebih lanjut, Fisher mengklasifikasikan identitas kedalam beberapa kriteria, antara lain: bahasa, agama, wilayah, organisasi sosial, budaya dan juga ras (Fisher, 2009, hal 47). Menjadi bagian dari suatu kelompok adalah kebutuhan esensial bagi tiap manusia sebagai mahluk sosial, inilah yang menyebabkan manusia mengklasifikasikan dirinya berdasarkan identitasnya.

Rasa identitas dapat meningkatkan persatuan diantara manusia namun disisi lain, rasa identitas juga dapat menyebabkan kekerasan kultural, yang apabila terus mendapatkan pembiaran maka akan berubah menjadi kekerasan terbuka. Perbedaan terhadap identitas kelompok masyarakat dapat dengan mudahnya berubah menjadi ancaman apabila kelompok masyarakat yang memiliki identitas yang berbeda merasakan adanya ancaman terhadap identitas mereka. Ancaman terhadap rasa identitas ini kerap kali muncul dalam bentuk paling kecil dan paling sederhana yakni rasa benci. Kebencian terhadap identitas yang berbeda sesungguhnya merupakan bentuk kekerasan kultural, dimana menurut Johan Galtung, kekerasan kultural merupakan salah satu bentuk kekerasan yang tidak terlihat. Meskipun tidak terlihat namun apabila kekerasan ini terus mendapatkan pembiaran maka masih menurut Galtung, kekerasan tersebut dapat tereskalasi dan berubah menjadi kekerasan terbuka. Konflik etnis

adalah salah satu contoh kekerasan terbuka yang disebabkan oleh friksi antara identitas yang berbeda. Sementara pada tingkatan kekerasan kultural, contoh nyatanya adalah diskriminasi rasial.

Isu diskriminasi rasial di Amerika Serikat yang tidak kunjung usai, melahirkan *social movement* yang dinamai Black Lives Matter pada tahun 2013. Black Lives Matter terbentuk sebagai respon atas berbagai tindak kekerasan yang dialami oleh masyarakat Afrika-Amerika yang dilakukan oleh oknum polisi di Amerika Serikat. Gerakan ini memiliki tujuan untuk menghapuskan supremasi kelompok masyarakat kulit putih serta menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap kelompok masyarakat Afrika-Amerika. Gerakan ini mencoba menghentikan diskriminasi rasial dengan menggunakan cara-cara nir-kekerasan karena mereka percaya sistem yang selama ini berjalan di Amerika, memberikan sumbangsih pada aksi-aksi diskriminasi rasial yang dialami oleh kelompok masyarakat Afrika-Amerika sehingga perjuangan gerakan ini mengacu pada perubahan sistem tersebut (blacklivesmatter.com).

Tujuh tahun sejak terbentuknya gerakan Black Lives Matter, nyatanya isu diskriminasi rasial masih terjadi di Amerika Serikat. Kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap masyarakat Afrika-Amerika masih terus terjadi. Pada tanggal 25 Mei 2020, seorang pria Afrika-Amerika bernama George Floyd meninggal dunia. Kematian Floyd dianggap sebagai akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum Polisi di Minnesota, Amerika Serikat. Floyd yang kala itu ditangkap karena dugaan melakukan transaksi dengan menggunakan uang palsu, merintih kesakitan dan mengaku kesulitan bernapas setelah salah satu Polisi menekan leher Floyd. Kematian Floyd sontak menimbulkan gelombang protes, tidak hanya

melalui media sosial tetapi masyarakat Amerika juga berbondong-bondong turun ke jalan dan menyuarakan aspirasi mereka, menuntut keadilan bagi Floyd sekaligus penghentian berbagai tindakan kekerasan yang berlandaskan diskriminasi rasial. Tagar #BlackLivesMatter sontak ramai membanjiri berbagai platform media sosial. Gelombang protes yang terjadi di Amerika juga turut menyita perhatian masyarakat internasional. Tidak membutuhkan waktu yang lama sampai aksi serupa turut dilakukan oleh masyarakat di negara-negara lainnya di dunia, termasuk di Australia.

Gelombang protes Black Lives Matter yang terjadi di beberapa kota besar di Australia seperti Sydney, Brisbane, Adelaide dan Melbourne, bukanlah sekedar bentuk solidaritas dan rasa simpati bagi George Floyd ataupun kelompok masyarakat Afrika-Amerika tetapi masyarakat Australia juga menuntut keadilan bagi etnis Aborigin yang selama ini kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi rasial dari pemerintah Australia, terutama bagi etnis Aborigin yang mengalami tindak kekerasan hingga berujung pada kematian ketika sedang berada dalam penahanan kepolisian Australia.

Serupa dengan George Floyd, David Dungay seorang pria Aborigin meninggal didalam penjara Sydney pada tahun 2015. Dungay meninggal karena kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian, bahkan kata terakhir Dungay serupa dengan kata terakhir dari Floyd, yakni “aku tidak bisa bernapas”. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga Dungay yang diwakili oleh Pengacara keluarga mengatakan kalau Dungay meninggal setelah mendapatkan penyiksaan dari empat orang oknum kepolisian. Keluarga Dungay telah membawa kasus ini ke jalur hukum namun kasus ini tidak kunjung mendapatkan titik terang (*“In Australia, Protesters Demand Justice Over*

Minority Deaths In Custody” : cnn.com).

Australia adalah negara dengan jumlah penduduk sebanyak 25 juta orang, dimana 2,4% diantaranya merupakan masyarakat asli Australia yakni etnis Aborigin, namun disisi lain, dari keseluruhan jumlah populasi narapidana di Australia, seperempatnya merupakan masyarakat etnis Aborigin. Change the Record, sebuah koalisi keadilan bagi etnis Aborigin mengatakan bahwa terdapat 449 kematian etnis Aborigin didalam tahanan antara tahun 1980 hingga 2011, angka ini mewakili 24% dari total jumlah kematian narapidana didalam tahanan selama periode tersebut (Close The Gap Report 2020).

Gelombang aksi protes Black Lives Matter yang beresonansi hingga ke Australia, sempat mengejutkan sebagian publik Australia dan juga elit politik di Australia. Terlebih lagi, karena aksi di Australia bukan hanya sekedar aksi solidaritas tetapi juga turut menyoroti tindakan diskriminasi rasial yang terjadi di Australia selama ini. Perdana Menteri Australia, Scott Morrison mengatakan bahwa gelombang aksi protes Black Lives Matter di Australia awalnya merupakan gerakan untuk menuntut keadilan namun kemudian ia merasa bahwa semakin lama gerakan ini justru memiliki agenda politis didalamnya.

Tulisan ini mencoba mengkaji resonansi Black Lives Matter di Australia, mengapa gerakan yang telah terbentuk sejak tahun 2013 silam di Amerika Serikat, baru beresonansi di Australia pada tahun 2020. Namun tulisan ini terlebih dahulu akan menjabarkan tentang sejarah diskriminasi rasial di Australia serta perjuangan etnis Aborigin menuntut keadilan. Tulisan ini juga akan menganalisa apakah diskriminasi rasial merupakan *human nature* yang sulit untuk dihilangkan ataukah ada upaya konkrit yang

dapat dilakukan untuk menghapuskan aksi-aksi diskriminasi rasial dikemudian hari.

TINJAUAN LITERATUR

Terdapat beberapa tulisan terdahulu yang secara substansial memiliki relevansi dengan tulisan ini dan dianggap dapat dijadikan bahan pertimbangan yang signifikan dalam proses penulisan. Penulis berusaha meninjau penelitian terdahulu yang memiliki fokus penelitian yang serupa yakni mengenai gerakan Black Lives Matter. Penelitian yang coba ditinjau oleh penulis adalah penelitian yang ditulis oleh Julian Milzam Erlangga yang berjudul "Gerakan Perlawanan Terhadap Rasisme Bentuk Baru "*Black Lives Matter*" di Amerika Serikat"

Setelah meninjau dan mengkaji tulisan dari Julian Erlangga mengenai Gerakan Perlawanan Terhadap Rasisme Bentuk Baru "*Black Lives Matter*" Di Amerika Serikat, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor munculnya gerakan *Black Lives Matter* di Amerika Serikat, strategi kampanye *Black Lives Matter* hingga perkembangan gerakan *Black Lives Matter* menjadi gerakan sosial baru di Amerika Serikat.

Erlangga menuliskan bahwa kemunculan gerakan *Black Lives Matter* merupakan sebuah jawaban dari permasalahan rasisme bentuk baru di Amerika. Gerakan ini menuntut penghentian berbagai tindakan rasisme serta memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Amerika. Adapun faktor yang mencetus kemunculan gerakan Black Lives Matter antara lain: adanya kondusivitas struktural dengan terjadinya rasisme bentuk baru, terjadi ketegangan struktural dengan serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, faktor pemercepat dengan kasus kematian seorang warga Afrika-Amerika oleh polisi, kemudian adanya penyebaran kepercayaan umum yaitu budaya rasisme yang telah mengakar kuat, selanjutnya adalah mobilisasi sumber daya dalam hal ini adalah warga masyarakat yang berpartisipasi dalam gerakan *Black Lives Matter* dan terakhir

adalah adanya kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.

Posisi penulis terhadap tulisan Erlangga adalah menyempurnakan tulisan yang telah ia lakukan. Menurut penulis, meskipun tulisan Erlangga telah dengan komprehensif menjelaskan awal kemunculan gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat beserta strategi yang dilakukan oleh gerakan tersebut dan perkembangannya sebagai gerakan sosial di Amerika namun melihat perkembangan dunia internasional, maka tulisan Erlangga masih bisa dikembangkan dengan melihat dampak maupun efektivitas dari gerakan *Black Lives Matter* itu sendiri. Penulis berargumen bahwa tulisan Erlangga yang amat komprehensif ini akan menjadi semakin sempurna apabila ia juga menjelaskan bagaimana dampak serta efektivitas dari serangkaian strategi yang telah dilakukan oleh gerakan *Black Lives Matter*.

METODE RISET

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif akan menekankan pada penghimpunan data untuk kemudian menganalisis data yang bersifat non angka dan kemudian data tersebut akan diolah secara deskriptif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini berupa data sekunder yakni data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain, yang artinya dalam tulisan ini, penulis tidak melakukan observasi secara langsung melainkan lebih mengacu kepada sumber-sumber yang ada yang diolah melalui studi kepustakaan (*Library Research*).

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Sejarah Diskriminasi Rasial di Australia

Permasalahan diskriminasi rasial di Australia bermula ketika ditahun 1770 Kapten James Cook, seorang armada dari Inggris berlayar menelusuri sepanjang pantai timur dan berhenti di Botany Bay. Cook mengklaim wilayah Australia sebagai Terra Nulius atau wilayah yang tidak bertuan, ia

kemudian memberikan usulan kepada pemerintah Inggris kala itu dalam mengatasi masalah kepadatan penjara-penjara di Inggris. Tahun 1787, armada pertama yang terdiri dari 11 kapal dan membawa 736 narapidana dengan 300 sipir berlayar dari Inggris menuju Australia. Secara tradisional, motif utama pemerintah Inggris menjadikan Australia sebagai negara koloninya adalah sebagai solusi atas masalah kepadatan penjara-penjara di Inggris namun Inggris juga memiliki motif lain yakni ingin menjadikan Australia sebagai naval supply and maritime base. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan peningkatan pelayaran dan perdagangan Inggris dengan Tiongkok atau yang lebih dikenal sebagai kebijakan *swing to the east*.

Secara perlahan pemerintah Inggris kemudian membentuk sistem pemerintahan di Australia. Bahkan ditahun 1850, pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang yang disebut dengan Australian Colonies Act. Dengan terbentuknya sistem pemerintahan, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh masyarakatnya, termasuk warga asli Australia yakni suku Aborigin. Pada mulanya, pemerintah Australia melihat ada banyak anak-anak suku Aborigin yang tidak terurus, hidup di alam terbuka dan tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan juga kebersihan. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penertiban terhadap anak-anak suku Aborigin. Penertiban anak-anak suku Aborigin dilakukan tidak hanya agar mereka mendapatkan pendidikan dan akses terhadap kesehatan tetapi juga agar mereka dapat berbaur dengan anak-anak kulit putih. Niat baik pemerintah Australia ini didukung oleh para tokoh masyarakat pada saat itu.

Namun dalam proses pelaksanaannya, kebijakan ini berbanding terbalik dengan niat awal pemerintah. Pemerintah tidak hanya mengumpulkan anak-anak yang tidak terurus tetapi pemerintah juga mengambil secara paksa anak-anak suku Aborigin yang hidup sejahtera dengan orang tuanya. Anak-anak yang sudah diambil oleh pemerintah Australia tidak akan bisa lagi bertemu dengan

orang tua mereka. Anak-anak tersebut kemudian dikumpulkan dalam sebuah kamp, untuk nantinya diberikan edukasi tentang gaya hidup orang kulit putih. Apabila anak-anak suku aborigin tersebut telah memasuki usia dewasa, maka mereka akan keluar dari kamp untuk selanjutnya dipekerjakan sebagai budak bagi keluarga kulit putih di Australia. Hal inilah yang menyebabkan banyak pihak mengklaim bahwa Stolen Generation bukan hanya sekedar bentuk diskriminasi rasial tetapi juga perbudakan serta cultural genocide atau genosida budaya yakni sebuah upaya pembersihan budaya.

Pemerintah Australia juga membuat serangkaian aturan hukum yang mengatur tentang Stolen Generation, aturan hukum ini dibuat oleh masing-masing negara bagian di Australia, antara lain, di tahun 1905 dikeluarkan The Western Australia Aborigines Act, dimana aturan hukum ini melegalkan negara memisahkan seorang anak aborigin dibawah usia 16 tahun dengan keluarganya untuk menjalani program pemerintah. Kemudian di tahun 1911, dikeluarkan lagi aturan hukum The South Australian Aborigines Act yang melegalkan negara memisahkan anak aborigin yang berusia dibawah 21 tahun dari keluarganya. Terakhir ada pula aturan Northern Territory Aborigines Ordinance yang melegalkan pemisahan anak aborigin dibawah usia 18 tahun dengan keluarganya.

Gerakan rekonsiliasi menuntut hak-hak sipil yang sama bagi masyarakat suku Aborigin, mulai dikampanyekan pada akhir tahun 1950-an, masyarakat suku aborigin yang didukung pula oleh aktivis hak asasi manusia bersama-sama melakukan kampanye serta berjuang untuk pencabutan serangkaian aturan hukum yang merampas kebebasan sipil bagi masyarakat suku aborigin. Perjuangan ini terus berlanjut hingga tahun 1958, dimana pada bulan Februari, sejumlah aktivis membentuk kelompok kepentingan yang mereka namai Federal Council for Aboriginal Advancement (FCAA) yang bertujuan untuk memperjuangkan hak sipil serta kebebasan bagi masyarakat aborigin serta mencabut semua peraturan yang

mendiskriminasi suku aborigin dan melakukan amandemen terhadap undang-undang. Tahun 1965, sebuah kampanye sipil yang dipimpin oleh Charles Perkins dan diberi nama The Freedom Ride of 1965, berfokus menyuarkan kondisi kehidupan masyarakat Aborigin yang berada di luar kota, dimana banyak dari masyarakat Aborigin tersebut, hidup dalam kondisi yang tidak layak.

Perjuangan panjang masyarakat aborigin mulai menemukan titik terang ditahun 1967, dimana pada tanggal 27 Mei 1967, pemerintah federal Australia menggelar referendum dengan mandat untuk menerapkan kebijakan atas dasar persamaan bagi setiap warga Australia. Pada tahun 1991, pemerintah federal Australia membentuk The Council for Aboriginal Reconciliation, yang kemudian berganti nama menjadi Reconciliation Australia pada tahun 2000, yang bertugas untuk mempromosikan adat dan kebudayaan suku Aborigin. Puncak perjuangan masyarakat aborigin dalam memperjuangkan tanggung jawab pemerintah atas Stolen Generation terjadi pada tahun 2008 silam, dimana Perdana Menteri Australia kala itu Kevin Rudd menyampaikan sebuah pidato permintaan maaf atas segala dosa masa lalu yang dilakukan oleh pemerintah Australia terdahulu kepada masyarakat Aborigin, khususnya kepada para generasi dari Stolen Generation. Rudd mengatakan bahwa apa yang telah pemerintah Australia perbuat dimasa lalu berangkat dari asumsi-asumsi rasial terhadap suku aborigin, oleh karenanya berbagai kebijakan yang dibuat dimasa lalu kerap memarginalkan masyarakat aborigin. Dalam pidatonya, Rudd juga mengungkapkan harapannya untuk mensejajarkan masyarakat aborigin dengan masyarakat kulit putih sebagai masyarakat Australia yang setara. Dalam kesempatan yang sama, Kevin Rudd juga menetapkan tanggal 26 Mei sebagai National Sorry Day. National Sorry Day adalah suatu hari untuk mengenang masyarakat suku aborigin yang termarginalkan karena kebijakan masa lampau pemerintah Australia serta menjadi

hari untuk merayakan adat dan kebudayaan masyarakat suku aborigin.

Kehidupan Etnis Aborigin Serta Upaya Emansipasi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Australia Pasca Sorry Speech

Bagi masyarakat suku Aborigin pidato permintaan maaf Kevin Rudd dianggap sebagai suatu hasil positif atas perjuangan panjang masyarakat suku Aborigin dalam menuntut hak asasi kepada pemerintah Australia. Tidak sedikit dari masyarakat suku Aborigin yang mengaku terharu ketika mendengar pidato permintaan maaf dari Kevin Rudd, namun disisi lain, masyarakat suku Aborigin tentu saja tidak langsung berpuas diri hanya dengan permintaan maaf. Bagi para aktivis dan pejuang hak asasi manusia masyarakat suku Aborigin, permintaan maaf hanyalah sebuah permulaan. Pemerintah Australia juga dituntut untuk melakukan upaya emansipasi bagi masyarakat Aborigin, sebuah program dibawah Komisi Hak Asasi Manusia Australia yang dinamai sebagai Close The Gap, dimana didalam program tersebut terdapat beberapa target yang menyangkut hidup masyarakat suku Aborigin yakni angka harapan hidup terutama bagi bayi dan balita, akses terhadap pendidikan dasar seperti membaca, menulis dan berhitung, lapangan pekerjaan hingga akses kesehatan.

Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Australia pasca permintaan maaf Kevin Rudd, sebagai upaya Close The Gap atau menutup celah perbedaan antara masyarakat suku Aborigin dan juga masyarakat kulit putih Australia. Ditahun yang sama dengan penyampaian pidato permintaan maaf Kevin Rudd, pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan pembayaran kompensasi bagi masyarakat suku Aborigin khususnya kepada para generasi dari *Stolen Generation*. Pemberian

uang kompensasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi masalah trauma dan juga penderitaan yang telah dialami oleh generasi dari *Stolen Generation*. Namun pemberian uang kompensasi ini menuai pro dan kontra ditengah masyarakat suku Aborigin kala itu. Banyak dari mereka yang menyambut niat baik dari pemerintah Australia tetapi tidak sedikit pula yang merasa bahwa pembayaran uang kompensasi hanya menjadi solusi jangka pendek, sementara masyarakat suku Aborigin memerlukan solusi jangka panjang untuk kehidupan mereka yang lebih baik dikemudian hari. Masyarakat suku aborigin membutuhkan upaya pemerintah dalam mengatasi rendahnya angka harapan hidup bayi dan balita, masyarakat suku aborigin juga membutuhkan akses terhadap pendidikan dasar dan juga kesehatan serta ekonomi guna menekan angka pengangguran (Close The Gap Report 2020).

Tahun 2010, dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Julia Gillard, dilakukan referendum konstitusi untuk memberikan pengakuan kepada masyarakat suku Aborigin sebagai masyarakat asli atau pribumi Australia serta memberikan hak-hak konstitusional kepada mereka. Namun hingga akhir masa kepemimpinan Julia Gillard, pengakuan hak-hak masyarakat suku Aborigin belum juga diatur dalam konstitusi. Tahun 2015, Perdana Menteri Tony Abbott, memberikan janji yang tidak jauh berbeda dari Julia Gillard. Abbott mengatakan bahwa pada tahun 2017, hak-hak masyarakat suku Aborigin termasuk hak konstitusional mereka akan diakui dalam konstitusi. Tidak jauh berbeda dengan Gillard, Abbott pun gagal memenuhi janjinya kepada masyarakat suku Aborigin (*"Australia akan mengakui Aborigin dalam konstitusi pada 2017"* : cnnindonesia.com).

Tahun 2019, Perdana Menteri Scott Morrison mengaku bahwa menurutnya, 11

tahun pasca permintaan maaf Kevin Rudd, pemerintah Australia telah gagal dalam memenuhi hak serta upaya emansipasi terhadap masyarakat suku Aborigin. Namun lebih lanjut Morrison mengatakan bahwa ia akan melanjutkan janji Julia Gillard dan juga Tony Abbott, untuk memberikan pengakuan atas hak-hak masyarakat suku Aborigin termasuk hak konstitusional mereka dalam konstitusi. Morrison memiliki ambisi untuk melakukan referendum perubahan konstitusi terkait masyarakat pribumi pada tahun 2022. Banyak pihak mengklaim bahwa dengan diakuinya hak-hak masyarakat suku aborigin sebagai pribumi termasuk memberikan hak konstitusional kepada mereka, maka akan membantu menghilangkan berbagai tindakan diskriminasi rasial terhadap masyarakat suku aborigin serta menciptakan identitas nasional Australia yang lebih inklusif (*"Australia janjikan referendum pengakuan Aborigin dalam Konstitusi"* : medcom.id).

Pernyataan Perdana Menteri Scott Morrison yang mengatakan bahwa pemerintah Australia telah gagal dalam memenuhi hak serta upaya emansipasi bagi masyarakat suku Aborigin tidak dapat dikatakan salah. Berdasarkan laporan Close The Gap yang dipublikasikan pada bulan Maret tahun 2020, dikatakan bahwa pemerintah Australia telah gagal memperbaiki angka harapan hidup bagi masyarakat suku Aborigin, hal ini tidak terlepas dari tingginya angka kematian akibat bunuh diri yang dilakukan oleh masyarakat suku Aborigin akibat kemiskinan. Selain itu pemerintah Australia juga dianggap telah gagal memberikan kesetaraan dalam bidang kesehatan kepada masyarakat suku Aborigin. Laporan Close The Gap tahun 2020, memang menyoroti kebijakan pemerintah Australia dalam peningkatan angka harapan hidup serta kesetaraan dalam bidang kesehatan bagi masyarakat suku Aborigin. Dalam laporan

Close The Gap tahun 2020 menunjukkan kesenjangan angka harapan hidup diantara masyarakat suku Aborigin dan juga masyarakat kulit putih di Australia, dimana masyarakat kulit putih Australia yang berjenis kelamin laki-laki memiliki angka harapan hidup 8 tahun lebih lama dibanding masyarakat suku Aborigin berjenis kelamin laki-laki. Sementara untuk masyarakat kulit putih Australia yang berjenis kelamin perempuan memiliki angka harapan hidup 7 tahun lebih lama dibanding masyarakat suku Aborigin berjenis kelamin perempuan. Selain itu, masyarakat suku Aborigin juga memiliki resiko tertular penyakit yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat kulit putih Australia yakni hingga 2 sampai 3 kali lipat lebih rentan. Lebih lanjut laporan Close The Gap juga memaparkan bahwa hingga tahun 2020, ada sekitar 19% masyarakat suku Aborigin yang memiliki penyakit mental, 12% penyakit kardiovaskular, 9% penyakit kanker dan 8% penyakit pernapasan (Close The Gap Report 2020).

Masih dalam laporan Close The Gap, kegagalan pemerintah Australia khususnya dalam bidang kesehatan dan angka harapan hidup, tidak terlepas dari kebijakan yang mengabaikan aspek *local wisdom* serta tidak melibatkan masyarakat suku Aborigin itu sendiri. Layaknya masyarakat pribumi di negara lainnya, masyarakat suku Aborigin juga memiliki budaya dan kepercayaan yang mereka terapkan secara turun temurun. Bahkan masih banyak masyarakat suku Aborigin yang menerapkan metode pengobatan tradisional berdasarkan budaya serta kepercayaan leluhur mereka, sehingga penting bagi pemerintah Australia untuk membuat kebijakan tanpa mengabaikan aspek *local wisdom*, salah satu rekomendasi kebijakan yang disampaikan dalam Laporan Close The Gap adalah penggunaan bahasa pribumi. Penggunaan bahasa pribumi dapat menjadi jembatan antara pemerintah Australia dan juga masyarakat suku Aborigin

dalam mensosialisasikan serta menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan.

Gambar 1. Rekomendasi Kebijakan Bagi Pemerintah Australia



Sumber: Laporan Close The Gap, 2020

Lebih lanjut, dalam laporan Close The Gap tahun 2020 juga disampaikan bahwa pemerintah Australia perlu melibatkan akademisi maupun tokoh-tokoh dari masyarakat suku Aborigin dalam proses pembuatan kebijakan, hal ini tidak lain guna tercapainya suatu kebijakan yang baik dan efektif tanpa mengabaikan aspek *local wisdom*.

Black Lives Matter di Australia

Pada bulan Juli tahun 2020, masyarakat Australia memanfaatkan momentum aksi Black Lives Matter yang tengah menjadi sorotan masyarakat dunia pasca kematian seorang pria Afrika-Amerika bernama George Floyd. Aksi Black Lives Matter yang pertama kali merebak di sejumlah kota di Amerika Serikat dengan cepat beresonansi ke negara-negara lain di dunia termasuk Australia. Tercatat kota-kota besar di Australia seperti Melbourne, Sydney, Adelaide hingga Brisbane menggelar aksi protes Black Lives Matter.

Namun berbeda dengan di Amerika Serikat, aksi Black Lives Matter di Australia membawa misi tersendiri. Masyarakat Australia yang turun kejalan dalam aksi Black Lives Matter tersebut menyoroti kasus diskriminasi rasial yang ada di Australia terutama tingginya angka kematian warga

minoritas terutama masyarakat suku Aborigin yang berada didalam penjara. Mereka percaya bahwa tingginya angka kematian didalam penjara ini tidak terlepas dari berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian Australia (*"In Australia Protesters demand justice over minority deaths in custody"* : cnn.com).

Gambar 2. Aksi Protes Black Lives Matter di Melbourne, Australia



Sumber: www.cnn.com

Masyarakat Australia yang terlibat dalam aksi Black Lives Matter kembali mengangkat kasus kematian David Dungay, seorang pria Aborigin pengidap Skizofrenia. Dungay meninggal di rumah sakit penjara Long Bay setelah mengalami tindak kekerasan dari empat oknum kepolisian di penjara kota Sydney pada tahun 2015. Keluarga David Dungay menuntut empat oknum polisi yang telah melakukan tindak kekerasan kepada Dungay hingga berujung pada kematian namun hingga tahun 2020, keluarga Dungay tidak kunjung mendapatkan keadilan.

Berdasarkan laporan The Australian Human Rights Commission yang dirilis pada bulan Juni tahun 2020, Sejak tahun 1991, tercatat telah ada 432 masyarakat suku Aborigin yang meninggal ketika berada didalam penjara. Masyarakat suku Aborigin juga menjadi etnis masyarakat yang paling banyak berada dalam penjara dibanding etnis-etnis lainnya di dunia. 28% populasi

penjara di Australia dipenuhi dengan masyarakat suku Aborigin. The Australian Human Rights Commission terus melakukan sejumlah upaya untuk menekan angka kematian masyarakat suku Aborigin didalam penjara. Mereka memberikan edukasi kepada anak-anak muda suku Aborigin tentang sistem peradilan di Australia, dengan harapan pemberian edukasi ini akan membantu anak-anak muda suku Aborigin terjerat dalam kasus hukum. Selama hampir 30 tahun, The Australian Human Rights Commission juga kerap memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Australia terkait sistem peradilan di Australia dan juga dampak *over incarceration* atau penahanan yang berlebih terhadap masyarakat suku Aborigin, namun tidak satupun rekomendasi kebijakan tersebut diimplementasikan oleh pemerintah Australia. *Over incarceration* terhadap suku Aborigin yang terjadi di Australia dianggap sebagai bentuk diskriminasi rasial yang sistemik (The Australian Human Right Commission Report *"Calls to end indigenous death in custody"* 2020).

The Australian Human Rights Commission menyerukan reformasi terhadap sistem peradilan di Australia, beberapa rekomendasi kebijakan yang disarankan oleh The Australian Human Rights Commission antara lain:

1. Membentuk mekanisme pengaduan dan investigasi independen untuk pelanggaran serta penggunaan kekerasan oleh oknum kepolisian.
2. Memastikan pengawasan yang sesuai didalam penjara, sesuai dengan UN Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Degrading Treatment and Punishment (OPCAT) – termasuk pengawasan sel tahanan bagi polisi, fasilitas transportasi serta fasilitas detensi.
3. Bekerja sama dengan masyarakat suku

Aborigin untuk mengembangkan program *justice reinvestment*.

Lebih lanjut, dalam laporan tersebut dikatakan bahwa dalam mengatasi permasalahan diskriminasi rasial terhadap masyarakat suku Aborigin di Australia, pemerintah Australia perlu berkomitmen kuat tidak hanya untuk mengatasi permasalahan kematian masyarakat suku Aborigin didalam penjara tetapi juga sejumlah permasalahan lainnya seperti masalah kesehatan, lapangan pekerjaan dan juga pendidikan. Mengutip pernyataan Race Discrimination Commissioner of The Australian Human Rights Commission, Chin Tan yang mengatakan bahwa,

“kohesi sosial bergantung pada otoritas yang menghormati kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memperlakukan semua orang secara setara, dengan bermartabat, hormat, dan adil, terlepas dari ras atau etnis”

Melihat kondisi diskriminasi rasial di Australia yang kerap merugikan etnis minoritas utamanya masyarakat suku Aborigin, maka bukanlah hal yang mengejutkan apabila gerakan Black Lives Matter yang pertama kali teretus di Amerika Serikat beresonansi di Australia. Mengapa masyarakat Australia perlu memanfaatkan gerakan Black Lives Matter dalam rangka perjuangan terhadap diskriminasi rasial terhadap etnis Aborigin ?

New Social Movement Theory lahir sebagai bentuk kritik atas teori pendahulunya yakni Social Movement Theory. Apabila Social Movement Theory berorientasi pada gagasan revolusioner maka New Social Movement Theory memiliki orientasi yang lebih plural. Definisi gerakan sosial dalam New Social Movement Theory berbeda dari teori lama, Social Movement Theory, dalam gerakan sosial era baru yang dianggap sebagai produk dari pergeseran ekonomi

pasca industri, kelompok masyarakat yang terlibat dalam gerakan sosial disatukan bukan oleh identitas tetapi oleh kepedulian kolektif. Gerakan sosial era baru pada umumnya merespon isu-isu yang bersumber dari kondisi sosial masyarakat, hal ini menyebabkan orientasi isu yang menjadi dasar kepedulian kolektif masyarakat lebih bersifat plural. Masyarakat dalam gerakan sosial era baru cenderung mengangkat isu-isu seperti isu lingkungan, isu kebebasan sipil, isu feminisme, isu anti nuklir hingga isu diskriminasi rasial. Kepedulian kolektif inilah yang mengaburkan lintas batas negara sehingga tidak seperti gerakan klasik, gerakan sosial era baru kerap kali melewati lintas batas negara. Aksi, strategi dan cara mobilisasi gerakan sosial baru juga dilakukan secara global. Gerakan sosial era baru juga didefinisikan dengan pluralitas cita-cita, tujuan, kehendak dan orientasi oleh heterogenitas basis sosial masyarakat (Rajendra, 2010, hal 131). Alain Touraine mengidentifikasi kaitan antara gerakan sosial dengan konflik dominan yang telah ada didalam masyarakat. Dalam melihat gerakan sosial, Touraine memperkenalkan konsep historitas, yaitu keseluruhan sistem pemaknaan yang menciptakan aturan-aturan dominan dalam sebuah masyarakat yang sudah terbentuk (Touraine, 1981, hal 77-81).

Dapat disimpulkan bahwa Black Lives Matter adalah gerakan sosial era baru yang merespon isu yang bersumber dari kondisi sosial masyarakat. Seperti yang disampaikan Touraine, gerakan sosial lahir karena adanya konflik dominan didalam masyarakat, dalam hal ini, Black Lives Matter lahir karena adanya permasalahan diskriminasi rasial di Amerika Serikat. Gerakan ini kemudian beresonansi hingga ke Australia, kondisi ini terjadi karena terdapat konflik dominan didalam masyarakat Australia yang tidak terlalu jauh berbeda dengan kondisi masyarakat di Amerika yakni

terdapat diskriminasi rasial terhadap kelompok masyarakat minoritas. Gerakan sosial era baru kerap kali melewati lintas batas negara, hal ini karena gerakan sosial era baru disatukan oleh kepedulian kolektif. Dalam gerakan Black Lives Matter, baik masyarakat Amerika maupun Australia memiliki kepedulian kolektif yang sama yakni terkait diskriminasi rasial yang kerap menimpa kelompok masyarakat minoritas. Kepedulian kolektif ini lahir dari konflik dominan yang telah ada dalam masyarakat. Melihat sejarahnya, Amerika maupun Australia memiliki sejarah panjang terkait diskriminasi rasial terhadap kelompok masyarakat minoritas. Selaras dengan yang disampaikan Touraine, sistem pemaknaan ini menciptakan aturan dominan dalam sebuah masyarakat yang sudah terbentuk. Dengan kata lain, sejarah panjang Australia terhadap isu diskriminasi rasial terhadap masyarakat suku Aborigin telah menciptakan aturan, tatanan hingga sistem didalam masyarakat yang kerap mendiskriminasi masyarakat suku Aborigin. Konflik dominan didalam masyarakat inilah yang menjadi faktor resonansi gerakan *Black Lives Matter* di Australia.

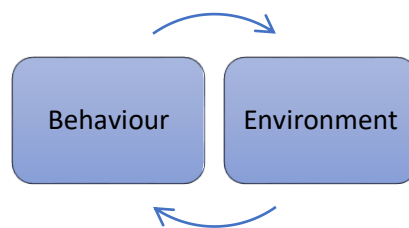
Diskriminasi Rasial: Human Nature atau Human Nurture?

Setelah menjelaskan mengapa gerakan Black Lives Matter yang teretus di Amerika dapat beresonansi hingga ke Australia, tulisan ini juga akan menganalisa mengenai diskriminasi rasial didalam masyarakat internasional khususnya masyarakat Australia. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Australia memiliki sejarah panjang terkait diskriminasi rasial terhadap masyarakat suku Aborigin. Kondisi ini menciptakan konflik dominan didalam masyarakat Australia yang mengakar hingga sekarang. Gerakan Black Lives Matter yang beresonansi di Australia merupakan bukti perlawanan masyarakat Australia terhadap konflik dominan tersebut. Lalu, apakah tidak ada solusi dalam mengatasi diskriminasi

rasial? Apakah diskriminasi rasial adalah sifat alami manusia (*human nature*) ataukah sifat yang dipelajari oleh manusia (*human nurture*) ?

Nelson Mandela pernah berujar bahwa tidak ada manusia yang terlahir jahat. Semua manusia terlahir dengan sifat-sifat baik yang melekat pada dirinya. Manusia kemudian belajar tentang sifat-sifat buruk dan menjadikannya jahat. Pandangan Nelson Mandela ini serupa dengan pemikiran Albert Bandura melalui *social learning theory* yang ia cetuskan. Menurut *Social Learning Theory*, sebagian besar perilaku manusia dipelajari melalui hasil observasi atas tingkah laku orang lain, yang mana kemudian hasil observasi atau pengamatan ini membentuk suatu gagasan akan bagaimana seseorang harus bersikap. Bandura menambahkan bahwa tidak hanya lingkungan yang mampu mempengaruhi perilaku seseorang akan tetapi perilaku seseorang pun dapat mempengaruhi lingkungannya. Dengan kata lain, terdapat hubungan timbal balik antara perilaku dan lingkungan (Bandura, 1973, hal 79).

Gambar 3. Hubungan Timbal Balik Antara Lingkungan dan Perilaku Menurut Social Learning Theory



Sumber : Albert Bandura. 1973.

“Aggression: A Social Learning Analysis”

Berkaca dari pernyataan Nelson Mandela dan juga Social Learning Theory Albert Bandura, maka sikap rasisme bukanlah sifat alami manusia (*human nature*) melainkan sifat yang dipelajari manusia dari manusia lainnya atau dari lingkungan tempat manusia itu

bertumbuh (*human nurture*). Setelah mengetahui bahwa rasisme adalah *human nurture*, lantas mengapa di era modern seperti saat ini, kasus-kasus diskriminasi rasial masih dengan mudahnya dapat ditemui dan kerap menimpa kelompok masyarakat minoritas ?

Permasalahan diskriminasi rasial tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai identitas. Menurut ilmu sosiologi, manusia cenderung menempatkan individu ataupun kelompok dalam suatu kategori yang nantinya akan menciptakan suatu stereotipe dan tidak jarang stereotipe ini menghasilkan suatu pemikiran yang tidak akurat karena dibuat berdasarkan informasi yang tidak sempurna. Manusia adalah makhluk sosial sehingga penting bagi setiap manusia untuk menjadi bagian dari suatu kelompok, selain untuk memberikan rasa aman terhadap diri mereka, menjadi bagian dari suatu kelompok identitas tertentu juga memberikan rasa percaya diri bagi manusia tersebut akan siapa sesungguhnya diri mereka atau dengan kata lain, mempertahankan jati diri mereka.

Amartya Sen dalam bukunya yang berjudul *Identity and Violence* mengatakan bahwa rasa memiliki suatu identitas bukan hanya bisa menjadi sumber lahirnya kebanggaan dan kebahagiaan, melainkan pula sumber tumbuhnya kekuatan dan kepercayaan diri. Namun rasa identitas juga dapat memicu pecahnya berbagai tindak kekerasan. Lebih lanjut, Sen mengatakan bahwa berbagai tindak kekerasan yang terjadi di dunia yang berakar dari perbedaan identitas terjadi karena selama ini manusia memandang manusia lainnya hanya sebagai identitas tunggal. Menurut Sen, pendekatan ini justru menjadi pembuka jalan bagi lahirnya kesalahpahaman diantara hampir setiap orang di dunia. Amartya Sen mengatakan bahwa setiap manusia sesungguhnya memiliki lebih dari satu

identitas (Sen, 2006, hal 56).

Di Australia, masyarakat suku Aborigin hanya dipandang sebagai identitas tunggal yang melekat pada diri mereka. Bahwa mereka adalah orang Aborigin yang memiliki warna kulit yang berbeda dari mayoritas masyarakat Australia. Mereka juga dipandang sebagai kelompok masyarakat yang terbelakang. Apabila pemikiran Amartya Sen diterapkan kepada masyarakat suku Aborigin, sesungguhnya mereka bisa dipandang lebih dari sekedar warna kulitnya. Masyarakat suku Aborigin dapat dipandang berdasarkan profesinya, minat olahraganya, jenis kelaminnya hingga selera musik favoritnya. Ragam pandangan identitas ini tidak hanya memberikan identitas yang khas bagi setiap manusia tetapi juga menjadikan manusia memandang manusia lainnya secara setara. Ragam pandangan identitas ini pula yang menjadikan tidak satupun dari manusia di dunia ini yang dapat dipandang hanya berdasarkan identitas tunggalnya.

Namun pendekatan identitas tunggal dalam memandang seorang individu telah lama mengakar dalam diri manusia secara turun menurun yang kemudian menciptakan stereotipe terhadap identitas-identitas tertentu. Sudut pandang yang sempit inilah yang menyebabkan tindakan-tindakan rasial masih terjadi di era yang modern seperti saat ini. Dengan kata lain, apabila kita ingin menghapuskan diskriminasi rasial sebagai salah satu konflik dominan di masyarakat, maka kita sebagai bagian dari masyarakat perlu merubah cara pandang kita terhadap manusia lain dari yang selama ini hanya berdasarkan identitas tunggal menjadi pada ragam identitas seperti pemikiran Amartya Sen.

KESIMPULAN

Australia memiliki sejarah panjang terkait kasus diskriminasi rasial terhadap suku Aborigin. Meskipun pemerintah Australia telah meminta maaf secara resmi terhadap

masyarakat suku Aborigin atas serangkaian kebijakan masa lalu yang merugikan masyarakat suku Aborigin serta berjanji untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan yang akan mensejahterakan masyarakat suku Aborigin, nyatanya, hingga kini masyarakat suku Aborigin masih membutuhkan perhatian pemerintah Australia dalam bidang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan hingga ketidakadilan sosial mengingat tingginya angka masyarakat suku Aborigin yang berada didalam penjara. Tingginya angka masyarakat suku Aborigin yang berada didalam penjara berdampak pula pada tingginya angka kematian masyarakat suku Aborigin didalam penjara. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat Australia memanfaatkan momentum gerakan Black Lives Matter ditahun 2020.

Tanpa disadari, kasus diskriminasi rasial disejumlah negara terutama Australia berakar dari sejarah panjang negara tersebut dan telah menjadi konflik dominan ditengah masyarakat saat ini. Sulitnya menghapuskan berbagai bentuk diskriminasi rasial tidak terlepas dari pola pikir manusia yang memandang manusia lainnya hanya berdasarkan identitas tunggal yang ia miliki. Amartya Sen berpendapat bahwa, setiap manusia sesungguhnya memiliki lebih dari satu identitas. Sehingga tidak ada satupun manusia yang dapat atau layak dikategorikan hanya berdasarkan identitas tunggal. Ragam identitas dalam memandang manusia lain, menurut Sen, akan merubah pola pikir identitas tunggal yang selama ini mengakar kuat dalam diri manusia. Dengan memandang manusia lain berdasarkan ragam identitas yang dimilikinya alih-alih hanya identitas tunggal maka bentuk-bentuk diskriminasi rasial akan dapat diminimalisir.

REFERENSI

Bandura, Albert. (1973). *Aggression*: A

Social Learning Analysis. Englewood Cliffs, NJ: prentice-hall

Fisher, Simon. (2009). *Responding to Conflict*. London: The British Council

Singh, Rajendra. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book

Sen, Amartya. (2006). *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*. United Kingdom: Penguin Book

Touraine, Alain. (1981). *The Voice and The Eye: an Analysis of Social Movement*. Cambridge: Cambridge University Press

Galtung, Johan. (2004). *Violence, War and Their Impact: On Visible and Invisible Effects of Violence*

_____, *Close The Gap Report 2020*

The Australian Human Right Commission. *Calls To End Indigeneous Death In Custody*. (2020)

Australia akan mengakui Aborigin dalam Konstitusi pada 2017 tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150707145437-113-64944/australia-akan-mengakui-aborigin-dalam-konstitusi-pada-2017>

Australia janjikan referendum pengakuan aborigin dalam konstitusi tersedia di <https://www.medcom.id/internasional/asia/VNxZ3E8k-australia-janjikan-referendum-pengakuan-aborigin-dalam-konstitusi>

Black Lives Matter tersedia di www.blacklivesmatter.com

Here's why Black Lives Matter resonates in Australia tersedia di <https://www.canberratimes.com.au/story/6826632/heres-why-black-lives-matter-resonates-in-australia/>

In Australia, Protesters demand justice over minority deaths in custody tersedia di <https://edition.cnn.com/2020/06/06/australia/australia-black-lives-matter-protests-intl-hnk/index.html>

Rudd's Apology, 10 years on: the elusive hope of a "breakthrough moment" tersedia di <https://www.theguardian.com/australia-news/2018/feb/12/looking-back-at->

[rudds-apology-the-shining-hope-of-a-breakthrough-moment](#)

We must bear witness to black deaths in our own country tersedia di <https://www.canberratimes.com.au/story/6775418/we-must-bear-witness-to-black-deaths-in-our-own-country/>

